***DEIKTIS**: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, Vol. 5, No. 2, 2025
Copyright © the author(s)

Penggunaan Metafora dan Makna dalam Diskursus Politik pada Media Sosial (Kajian Pragmatik)

Fahriani[1]
Nur Khadijah Razak[2]
Ratnawati[3]
[123]Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

[1]fahrianiria11@gmail.com
[2]nurkhadijah@unismuh.ac.id
[3]ratnawati@unismuh.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metafora dan makna dalam diskursus politik di media sosial, khususnya pada *Platform Youtube*, dengan pendekatan pragmatik. Fokus penelitian diarahkan pada pada dialog politik yang diunggah oleh *channel The Habibie Center*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui pencatat, dan stuudi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metafora yang digunakan dalam diskursus politik di media sosial berfungsi untuk membangun citra politik, membingkai isu-isu tertentu, serta mempengaruhi opini publik. Tindak tutur ilokusi, seperti asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif, banyak ditemukan dalam penggunaan metafora tersebut. Tindak tutur asertif dalam pernyataan keyakinan dan penegasan terhadap ideologi tertentu. Direktif muncul dalam bentuk ajakan, permintaan, dan intruksi kepada publik atau pemerintah. Ekspresif terlihat pada ungkapan keprihatinan, kritik, dan pujian terhadap kondisi politik atau tokoh tertentu. Komisif digunakan dalam janji politik atau komitmen terhadap kebijakan, sedangkan deklaratif hadir dalam pengumuman atau pernyataan yang mengubah status politik tertentu. Selain itu, makna dalam diskursus politik tidak hanya bersifat literal, melainkan juga implisit yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan tujuan komunikatif penutur. Temuan ini mengaskan bahwa penggunaan metafora dalam diskursus politik di media sosial menjadi alat strategis dalam membentuk persepsi politik masyarakat.

Kata Kunci: *metafora, makna, diskursus politik, media sosial, pragmatik*

Abstract

This studyaims to analyze metaphors and meanings in political discourse on social media, especially on the Youtube platform, with a pragmatic approach. The focus of the study is directed at political dialogues uploaded by The Habibie Center channel. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through note-taking and literature studies. The results of the study indicate that the metaphors used in political discourse on social media function to build a political image, frame certain issues, and influence public opinion. Illocutionary speech acts, such as assertive, directive, expressive, commissive, and declarative, are ofter found in the use of these metaphors. Assertive speech acts in statements of belief and affirmation of a particular ideology. Directives appear in the form of invitations, requests, and instructions to the public or government. Expressives are seen in expressions of concern, criticism, and praise for certain political conditions or figures. Commissives are used in political promises or commitments to policies, while declaratives are present in announcements or statements that change a certain political status. In addition, the meaning in political discourse is not only literal, but also implicit which is influenced by the social context, culture, and communicative purpose of the speaker. This finding confirms that the use of metaphors in political discourse on social media is a strategic tool shaping the political perception of society.

Keywords: *metaphor, meaning, political discourse, social media, pragmatics*

Pendahuluan

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara kita, Indonesia. Sebagai elemen penting dalam komunikasi masyarakat, bahasa ini memegang peranan utama di seluruh penjuru tanah air. Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan komunikasi global berlangsung dengan begitu cepat, sehingga kita dapat terhubung lintas negara dan benua.

Namun, saat ini penggunaan bahasa Indonesia di media sosial seringkali tidak mematuhi kaidah yang benar sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan tata bahasa baku. Fenomena ini menarik perhatian para ahli bahasa, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Banyak pengguna media sosial di Indonesia cenderung menciptakan bentuk bahasa mereka sendiri, yang sering kali berupa singkatan atau bahkan campuran dengan bahasa asing (Anoval, KD, dan Rasyad, MIH, 2022: 4-5).

Suatu bahasa pada hakikatnya belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Pembelajaran bahasa sebagai alat komunikasi akan menarik minat karena kebutuhannya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam memenuhi atau meningkatkan keterampilan penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi dan dapat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia (Ratnawati, R, Tolla, A., & Rahim, A. R, 2018: 1117).

Penggunaan metafora dalam diskursus politik di media sosial semakin meningkat, terutama selama masa kampanye dan pemilihan umum. Salah satu contohnya adalah memanfaatkan metafora untuk membentuk citra kandidat, mempengaruhi opini publik, serta menyerang lawan politik (Hidayat, 2021: 200-210). Dalam konteks media sosial, metafora sering disajikan dalam bentuk narasi singkat yang mudah dipahami, sehingga mempercepat penyebaran makna dan dampaknya di kalangan masyarakat luas (Yulianti, 2022: 140).

Kajian pragmatik memiliki peran penting dalam memahami fungsi metafora dalam wacana politik. pragmatik mengeksplorasi tidak hanya makna literal, tetapi juga makna implisit yang muncul dari konteks percakapan atau diskursus (Leech, 2020: 35). Dengan demikian, analisis pragmatik dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai strategi komunikasi politik yang memanfaatkan metafora untuk memengaruhi opini publik di media sosial.

Lebih jauh, kajian pragmatik memberikan kesempatan kepeda peneliti untuk mengidentifikasi hubungan antara makna metaforis dan ideologi politik yang terkandung di dalamnya. Sebuah penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Santoso (2022: 145) menunjukka bahwa metafora yang digunakan dalam diskursus politik sering kali mencerminkan agenda tersembunyi serta kekuasaan yang ingin ditekankan oleh para aktor politik.

Pragmatik memiliki peranan yang sangat penting dalam hubungan antara tindak tutur dan bahasa politik, serta diskursus politik itu sendiri. Sebagai cabang linguistik, pragmatik mempelajari bagaimana konteks dapat mempengaruhi makna dalam komunikasi. Dalam diskursus politik, analisis pragmatik sangat diperlukan untuk memahami bagaimana tindak tutur digunakan guna mencapai tujuan tertentu, seperti persuasi, mobilisasi massa, atau pembentukan opini publik. Menurut John Searle (1979: 45-50), terdapat lima jenis tindak tutur, yaitu asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif.

Pertama, tindak tutur asertif digunakan oleh politisi untuk menyampaikan pernyataan atau klaim yang mencerminkan keyakinan mereka terhadap suatu fakta. Contohnya, dalam pidato kampanye, seorang kandidat politik sering kali menggunakan

ungkapan asertif untuk menunjukkan keberhasilan program pemerintah atau mengemukakan visi mereka.

Kedua, tindak tutur direktif bertujuan untuk meminta pendengar melakukan sesuatu, yang dapat berupa perintah, permintaan, atau saran. Dalam konteks politik, arahan sering digunakan untuk menggerakkan massa atau mengubah tindakan tertentu. Ketiga, tindak tutur ekspresif digunakan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, atau sikap pembicara terhadap situasi tertentu. Dalam konteks diskursus politik, bentuk ini sering muncul dalam pidato penghormatan, ungkapan belasungkawa, atau pengakuan atas prestasi orang lain.

Keempat, tindak tutur komisif mencerminkan komitmen pembicara untuk melakukan tindakan di masa depan. Dalam dunia politik, komisif seringkali terwujud dalam janji-janji atau pernyataan komitmen terhadap kebijakan tertentu. Terakhir, tindak tutur deklaratif merupakan jenis tindak tutur yang mampu mengubah status atau kondisi sesuatu melalui pernyataan. Dalam ranah politik, tindak tutur deklaratif sering kali tercermin dalam pengumuman resmi.

Dalam penelitian ini, pendekatan pragmatik diterapkan untuk memahami penggunaan metafora dalam diskursus politik di media sosial, yang bertujuan untuk mencapai tujuan komunikasi, serta mempengaruhi opini publik atau membentuk identitas politik tertentu. Menurut teori konteks pragmatik yang dikemukakan oleh Leech (1983: 56), konteks mencakup situasi, budaya, dan politik yang memengaruhi makna dari metafora tersebut. Selain itu, teori Maksim Grice (1975: 90) tentang maksim relevansi digunakan untuk menganalisis bagaimana metafora dapat menyampaikan pesan yang impilisit namun tetap relevan dalam konteks diskursus politik.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji penggunaan metafora dalam diskursus politik pada bebagai media sosial dalam *platform* komunikasi massa. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik dan mendalam mengkaji bagaimana metafora dalam diskursus politik di *YouTube* digunakan untuk membangun makna pragmatik, mengingat karakteristik unik platform ini, seperti penyampaian pesan melalui video, narasi visual, dan interaksi audiens melalui komentar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis penggunaan metafora dalam diskursus politik di *YouTube* secara pragmatik untuk memahami konstruksi makna dalam komunikasi politik.

Berdasarkan latar belakang dapat disimpulkan bahwa bahasa dalam diskursus politik di media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat persuasi dan propaganda untuk mempengaruhi opini publik. Penggunaan metafora dalam diskursus politik memungkinkan isu-isu kompleks menjadi lebih mudah dipahami melalui penyederhanaan konsep abstrak ke dalam bentuk konkret. Media sosial, sebagai *platform* komunikasi politik yang semakin dominan, memfasilitasi penyebaran metafora politik secara cepat dan luas.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan dasar teori pragmatik. Fokus penelitian diarahkan pada analisis penggunaan metafora dan makna dalam diskursus politik yang terdapat pada video unggahan channel The Habibie Center.

Data penelitian berupa tuturan dalam dialog politik pada tiga video bertema: Demokrasi Menuju Pemilu 2024: Wacana dan Praktis, Dialog Demokrasi: Evaluasi dan Arah Kebijakan Pilkada Serendak, tema ketiga Dialog Demokrasi Menelaah Politik Nasional Hingga Pasca Pencabutan Presidential Thrsold. Teknik pengumpulan data

dilakukan dengan metode observasi nonpartisipatif dan dokumentasi, serta pencatatan kutipan.

Proses analisis data dilakukan melalui identifikasi metafora dalam tuturan politik, klasifikasi berdasarkan jenis tindak tutur ilokusi (asertif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif), serta interpretasi makna dalam konteks sosial-politik.

Hasil

Berdasarkan analisis isi diskursus politik pada YouTube Channel The Habibie Center dengan tiga tema yaitu tema pertama Demokrasi Menuju Pemilu 2024: Wacana dan Praktis, tema kedua Dialog Demokrasi: Evaluasi dan Arah Kebijakan Pilkada Serendak, tema ketiga Dialog Demokrasi Menelaah Politik Nasional Hingga Pasca Pencabutan Presidential Thrsold, ditemukan beberapa penggunaan metafora dan makna dalam kajian pragmatik. Berikut ini adalah beberapa penggunaan metafora dan makna dalam tindak tutur asertif, ekspresif, direktif, komisif, dan deklarasi dalam video YouTube Channel The Habibie Center.

1. Penggunaan Metafora dalam Diskurusus Politik pada Media Sosial (kajian Pragmatik)

a. Tindak Tutur Asertif

TTA 1: Pemilu yang terakhir ini diwarnai oleh sejumlah cacat demokrasi.

Pada data TTA 1 menunjukkan bahwa cacat demokrasi berarti merujuk pada adanya ketidakberesan atau penyimpanan dari prinsip-prinsip demokrasi yang ideal selama proses pemilihan umum tersebut. Cacat demokrasi ini bisa berupa berbagai hal, misalnya kecurangan pemilu, pelanggaran hak pilih, manipulasi hasil pemilu, keterbatasan akses informasi bagi publik, ketidakadilan dalam proses kampanye, atau rendahnya partisipasimasyarakat.

> TTA 2: Demokrasi telah memberikan hak berbicara dan berserikat kepada mereka yang menentang hak-hak paradox demokrasi seperti kaum islam garis keras, taipan dan elit politik, serta mantan jenderal.

Pada data TTA 2 menunjukkan bahwa Paradox demokrasi berarti mengacu pada situasi di mana prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan berbicara dan berserikat, dapat menghasilkan hasil yang bertantangan dengan tujuan demokrasi itu sendiri. Dalam kasus ini, demokrasi memberikan kebebasan kepada kelompok-kelompok yang menentang hak-hak dasar demokrasi, seperti kaum islam garis keras, taipan dan elit, serta mantan jenderal, yang bisa menggunakan kebebasan tersebut untuk membatasi hak-hak orang lain atau bahkan mengancam stabilitas demokrasi. Ini menunjukkan bahwa demokrasi, meskipun bertujuan untuk melindungi kebebasan, memiliki kelemahan dalam menghadapi kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan kebebasan untuk tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

> TTA 3: Di tahun 2023 ini tahapan pemilu 2024 sudah dimulai dengan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu 2019 tidak dilakukan revisi dan masih berlaku.

Pada data TTA 3 menunjukkan bahwa tahapan pemilu berarti merujuk pada serangkaian proses yang terstruktur dan diatur dalam undang-undang yang harus dilalui untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Dalam pragmatik, tahapan pemilu tidak hanya merujuk pada rangkaian proses formal penyelenggaraan Pemilu seperti tertera dalam UU No. 7/2017, tetapi juga mengacup konteks implisit dan

implikasinya. Ungkapan ini mengandung makna yang lebih luas, mempertimbangkan tujuan komunikatif, di balik penyampaian informasi.

TTA 4: Pemilu 2019 telah kita lalui dengan berbagai dinamikanya.

Pada data TTA 4 menunjukkan bahwa dinamika berarti merujuk pada berbagai peristiwa, perubahan, dan interaksi yang terjadi selama proses pemilu. Makna pragmatisnya lebih luas, mempertimbangkan konteks percakapan dan maksud pembicara. Kata dinamika bisa mengandung implikasi tentang intensitas, kompleksitas, dan peristiwa-peristiwa penting yang berpengaruh signifikan terhadap jalannya Pemilu. Ini bisa meliputi isu-isu politik yang muncul, perdebatan publik, peran media, strategi kampanye, dan bahkan potensi konflik dan perselisihan.

TTA 5: Demokrasi ibarat berdagang.

Pada data TTA 5 menunjukkan bahwa demokrasi ibarat berdagang berarti menunjukkan bahwa demokrasi, seperti kegiatan berdagang, melibatkan proses negosiasi, kompromi, dan pertukaran kepentingan. Tidak ada kemenangan mutlak, tetapi semua pihak harus bersedia menawarkan sesuatu dan menerima lainnya. Dalam demokrasi, suara rakyat menjadi "modal" yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan kekuasaan atau pengaruh. Kata demokrasi ibarat berdagang ini menekankan aspek praktis dan strategis dari demokrasi, di mana permainan politik dan negosiasi merupakan bagian yang tak terpisahkan.

TTA 6: Pemilu yang tangguh dan dapat dipercaya.

Pada data TTA 6 menunjukkan bahwa dipercaya berarti merujuk pada kepercayaan publik terhadap integritasbdan keadilan proses Pemilu. Ini bukan sekadar kebenaran factual tentang kejujuran pemilihan itu sendiri, tetapi juga persepsi public mengenai hal tersebut. "Dipercaya" mencakup beberapa aspek: transparansi proses, kredibilitas lembaga, penyelenggaraan Pemilu, kepercayaan terhadap keamanan dan keadilan sisten pemilihan, serta kekurangan manipulasi atau kecurangan yang signifikan. Jika masyarakat percaya pada proses Pemilu, maka legitimasi hasil Pemilu akan lebih tinggi, dan stabilitas politik akan lebih terjamin.

TTA 7: Dialog Demokrasi: Evaluasi dan Arah Kebijakan Pilkada Serentak.

Pada data TTA 7 menunjukkan bahwa dialog demokrasi berarti merujuk pada proses komunikasi dan negosiasi yang terbuka dan partisipatif untuk mencapai kesepakatan atau solusi terkait penyelenggaraan Pilkada serentak, khususnya dalam situasi yang memerlukan evakuasi. Ini bukan sekadar percakapan biasa, tetapi proses yang menghargai pluralitas pendapat dan mencari kesempatan atas kebijakan yang diambil. Dialog demokrasi mengindikasikan bahwa semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, lembaga penyelenggara Pemilu, partai politik, dan masyarakat madani, diharapkan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan.

TTA 8: The Habibie Center didukung oleh Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia dan Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia

Pada data TTA 8 menunjukkan bahwa didukung oleh KAS Indonesia berarti yang lebih dari sekadar dukungan finansial atau logistic. Frasa ini menyiratkan beberapa lapisan makna tergantung pada konteksnya. Asosiasi dengan KAS Indonesia, sebuah organisasi yang dianggap bereputasi baik, memberikan kredibilitas dan kepercayaan

terhadap center, sehingga mendukung pekerjaannya. Implikasi pragmatis yang tepat sangat bergantung pada audiens dan konteks komunikasi yang lebih luas; namun, frasa tersebut jauh lebih sekadar pernyataan dukungan finansial.

TTA 9: Kami mengundang para profesional di bidang politik, pemerintahan, media, dan akademisi untuk bergabung atau berpartisipasi dalam diskusi ini guna untuk bertukar wawasan dan prespektif.

Pada data TTA 9 menunjukkan bahwa berpartisipasi berarti menekankan keterlibatan aktif para profesionalyang diundang. Bukan sekedar hadir, melainkan turut serta dalam proses diskusi dengan memberikan kontribusi berupa wawasan, perspektif, dan pendapat mereka. Partisipasi yang diharapkan bersifat interaksi dimana peserta tidak hanya mendengar, tetapi juga aktif menyampaikan ide, bertukar pikiran, dan terlibat dalam proses pembentukan kesimpulan atau rekomendasi. Dengan kata lain, berpartisipasi mengajak para professional untuk menjadi bagian integral dari diskusi, bukan hanya sebagai penonton pasif.

TTA 10: Peta Politik.

Pada data TTA 10 menunjukkan bahwa peta politik berarti merujuk pada representasi dinamis dan interpretatif dari kekuatan, pengaruh, dan hubungan antar aktor politik dalam suatu konteks tertentu. Ini bukan sekadar gambaran geografis wilayah kekuasaan, melainkan juga mencerminkan relasi kekuasaan yang komleks dan permainan strategi di mana antara berbagai pihak. Peta politik dapat berubah seiring waktu, tergantung pada berbagai faktor seperti pergeseran aliansi, perbuahan kebijakan, dan dinamika sosial politik. Peta politik dapat digunakan untuk menganalisis situasi, memprediksi perkembangan, atau bahkan memanipulasi opini publik.

TTA 11: Peta perpolitikan nasional.

Pada data TTA 11 menunjukkan bahwa peta berarti merujuk pada gambaranatau representasi visual dari konfigurasi kekuatan politik di Indonesia. Ini bukan peta geografis literal, melainkan peta abstrak yang menggambarkan hubungan antar aktor politik, seperti partai politik, tokoh kunci, kelompok kepentingan, dan dinamika kekuasaan mereka. Peta perpolitikan menunjukkan hubungan kompleks dan dinamis antar aktor-aktor tersebut, termasuk aliansi, persaingan, dan pengaruh mereka terhadap pengambilan keputusan di tingkat nasional. Pemahaman peta ini penting untuk menganalisis situasi politik terkini, memprediksi perkembangan politik masa depan, dan memahami bagaimana berbagai kebijakan dan peristiwa politik saling berkaitan.

b. Tindak Tutur Ekspresif

TTE 12: Cacat demokrasi.

Data TTE 12 menunjukkan bahwa cacat demokrasi berarti merujuk melalui ungkapan perasaan, sikap, dan penilaian terhadap kondisi demokrasi yang dianggap kurang ideal. Ungkapan ini bisa berupa kritik, ancaman, atau bahkan keputusan terhadap praktik demokrasi yang menyimpan dari nilai-nilai idealnya. Tindak tutur ekspresif dalam konteks cacat demokrasi bertujuan untuk mengungkapkan emosi dan sikap penutur terkait ketidakpuasan terhadap sistem demokrasi yang berjalan.

TTE 13: Pemilu berwarna.

Data TTE 13 menunjukkan bahwa Pemilu berwarna berarti merujuk pada interpretasi dan pemahaman kita terhadap fenomena pemilihan umum yang sarat dengan nuansa non-substansial. Ini bukan semata-mata deskripsi literal warna-warni atribut kampanye, melainkan metafora yang menggambarkan aspek-aspek pemilihan umum yang lebih menekankan pada penampilan, simbolisme, dan strategi politik daripada substansi gagasan dan program. Pragmatik melihat Pemilu berwarna sebagai kontruksi sosial yang dipengaruhi oleh faktor, termasuk media, budaya politik, dan strategis komunikasi para kandidat.

TTE 14: Beban psikologis yang tinggi.

Data TTE 14 menunjukkan bahwa beban psikologi yang tinggi bukan hanya sekadar pernyataan tentang kondisi mental seseorang, tetapi juga indikator dari konteks sosial dan interaksi komunikasi yang mempengaruhinya. Ungkapan ini menunjukkan adanya tekanan psikologis yang signifikan, yang bisa berasal dari berbagai sumber seperti tuntutan peran sosial, harapan lingkungan, atau konflik internal.

TTE 15: Pesta Demokrasi Lokal: Evaluasi dan Arah Kebijakan Pilkada Serentak.

Data TTE 15 menunjukkan bahwa pesta demokrasi lokal bukan sekadar deskripsi literal sebuah pemilihan umum di tingkat daerah, melainkan sebuah kontruksi sosial yang sarat makna dan implikasi. Ungkapan pesta menyiratkan suasana gembira, meriah, dan partisipatif, menunjukkan idealisasi proses demokrasi yang seharusnya melibatkan seluruh warga masyarakat.

TTE 16: Jangan lewatkan kesempatan ini.

Data TTE 16 menunjukkan bahwa jangan lewatkan kesempatan ini bahwa kesempatan yang dimaksudkan bernilai penting. Sifatnya ekspresif terlihat dari usaha penutur untuk mempengaruhi sikap dan tindakan pendengar, bukan sekadar menyampaikan informasi. Misalnya, ungkapan ini akan memiliki nuansa berbeda jika diucapkan oleh seorang penjual kepada calon pembeli dibandingkan dengan seorang guru pembeli muridnya. Intinya, kalimat tersebut menggunakan strategi perpuasa dengan menekankan nilai dan pentingnya kesempatan tersebut, serta mengajak pendengar untuk memanfaatkannya.

TTE 17: Peta politik nasional.

Data TTE 17 menunjukkan bahwa peta politik nasional menggambarkan distribusi kekuasaan dan pengaruh dalam suatu wilayah atau sistem tertentu. Ia bukan sekadar representasi geografis, melainkan refleksi dari dinamika sosial, ekonomi, dan ideologis yang membentuk hubungan antar aktor politik. Peta ini berupa representasi visual yang sederhana, menunjukkan wilayah kekuasaan berbagai entitas (negara, partai politik, kelompok kepentingan), atau bisa juga berupa analisis yang lebih kompleks yang mempertimbangkan faktor-faktor seperti aliran sumber daya, aliansi, dan konflik.

c. Tindak Tutur Direktif

TTD 18: Melakukan revisi pemilu.

Data TTD 18 menunjukkan bahwa melakukan revisi pemilu merujuk pada tindakan atau memperbaiki aturan, mekanisme, atau proses penyelenggaraan Pemilu. Ini bukan semata-mata perubahan administratif, melainkan tindakan yang sarat dengan

implikasi politik dan strategis. Revisi tersebut dapat didorong oleh berbagai faktor, antara lain: keinginan untuk meningkatkan kualitas Pemilu, mengantisipasi potensi kecurangan, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, atau mempertimbangkan dinamika politik terkini.

TTD 19: Mengadakan Dialog Demograsi.

Data TTD 19 menunjukkan bahwa mengadakan dialog demokrasi berarti memfasilitasi percakapan dan diskusi mengenai isu-isu kependudukan yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Ini bukan sekadar pengumpulan data atau penyampaian informasi, melainkan upaya untuk membangun pemahaman bersama dan mencari solusi kolektif atas tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh perubahan demogratif. Dialog yang efektif dapat menghasilkan kesepakatan tentang strategi pengelolaan penduduk, peningkatan kesadaran publik, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

TTD 20: Daftar sekarang juga melalui tautan atau klik tautan di bio.

Data TTD 20 menunjukkan bahwa daftar sekarang juga melalui tautan atau klik tautan di bio merupakan ajakan bertindak yang dirancang untuk mendorong audiens segera mendaftar. Frasa sekarang juga menekankan urgensi dan pentingnya tindakan segera. Penggunaan tautan di bio mengasumsikan konteks media sosial di mana biografi pengguna menjadi tempat yang mudah diakses untuk informasi lebih lanjut.

TTD 21: Catat tanggalnya.

Data TTD 21 menunjukkan bahwa catat tanggalnya merupakan intruksi yang menekankan pentingnya mengingat suatu tanggal spesifik. Ini buka sekadar informasi, melainkan tindakan mengingat dan mencatat, yang menunjukkan bahwa tanggal tersebut memiliki signifikansi tertentu bagi penerima pesan. Pragmatiknya terletak pada implikasi yang melekat pada tanggal tersebut, yang bisa berupa dealine, peringatan, atau momen penting lainnya. Keefktifan frasa ini bergantung pada konteks komunikasi, hubungan antara pengirim dan penerima pesan, dan signifikansi tanggal yang disebutkan.

d. Tindak Tutur Komisif

TTK 22: Memperketat persyaratan kesehatan untuk petugas pemilu.

Data TTK 22 menunjukkan bahwa memperketat persyaratan kesehatan menunjukkan sebuah strategi untuk meningkatkan standar kesehatan dan keselamatan. Ini bukan hanya sekadar perubahan aturan, tetapi juga tindakan yang berimplikasi pada berbagai aspek, termasuk aksesibilitas, biaya, dan efektiivitas. Pragmatiknya terletak pada tjuan dan dampak yang diharapkan, serta konsekuensi yang mungkin timbul. Memperketat persyaratan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, mengurangi risiko penyebaran penyakit, dan meningkatkan kepercayaan publik.

TTK 23: Kami mengundang para profesional di bidang politik, pemerintahan, media, dan akademisi untuk bergabung dalam diskusi ini guna bertukar wawasan dan prespektif.

Data TTK 23 menunjukkan bahwa profesional yang berujuk pada seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu. Ia mencakup serangkaian perilaku, sikap, dan kompetensi yang memperngaruhi interaksi dan persepsi orang lain. Pragmatiknya terletak pada cara kata tersebut digunakan untuk membentuk kesan,

membangun kepercayaan, dan memengaruhi hasil. Seorang yang disebut profesional diharapkan menunjukkan kompetensi teknis yang tinggi, etika kerja yang kuat, komitmen terhadap kualitas, dan kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif.

e. Tindak Tutur Deklaratif

TTD 24: Pemilu 2019 telah kita lalui dengan berbagai dinamikanya.

Data TTD 24 menunjukkan bahwa dinamika merujuk pada proses perubahan dan interaksi yang kompleks antara berbagai elemen dalam suatu sistem. Ini bukan sekadar deskripsi keadaan statis, melainkan gambaran tentang proses dan perkembangan yang terjadi seiring waktu. Pragmatiknya terletak pada cara kata ini digunakan untuk menggambarkan suatu situasi dan memengaruhi pemahaman orang lain. Penggunakan kata dinamika mengarah pada pemahaman bahwa situasi tersebut tidak tetap dan terus berubah, serta adanya interaksi dan pengaruh timbal balik antara berbagai faktor.

TTD 25: Pemilihan yang tangguh dan dapat dipercaya

Data TTD 25 menunjukkan bahwa pemilihan yang tangguh dan dapat dipercaya merupakan tujuan ideal yang mencerminkan kualitas proses pemilihan yang demokratis. Ini bukan sekadar pernyataan normative, melainkan kreteria yang dapat diukur dan dievaluasi berdasarkan berbagai indikator. Pragmatiknya terletak pada dampak frasa ini terhadap sistem, dan legitimasi hasil pemilihan. Tangguh menunjukkan ketahanan sistem pemilihan terhadap berbagai tekanan dan manipulasi, sementara dapat dipercaya menunjukkan akuntabilitas, transparansi, dan keakuratan proses penghitungan suara. Frasa ini menciptakan ekspektasi tertantu terhadap proses pemilihan, dan kegagalan untuk memenuhi ekspektasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi politik dan sosial yang signifikan.

TTD 26: Menelaah Peta Politik Nasional.

Data TTD 26 menunjukkan bahwa menelaah peta politik nasional berarti melakukan analisis mendalam terhadap konfigurasi kekuatan politik di tingkat nasional. Ini bukan sekadar membaca peta secara literal, tetapi memahami dinamika, interaksi, dan implikasi dari berbagai kekuatan politik yang ada. Pragmatiknya terletak pada tujuan analisis digunakan dan bagaimana hasil analisis digunakan untuk memahami dan memengaruhi situas politik. Menelaah peta politik nasional melibatkan identifikasi aktor politik kunci, analisis hubungan antar aktor, evaluasi kekuatan dan kelemahan masing-masing aktor, serta prediksi terhadap perkembangan politik di masa mendatang.

2. Penggunaan Makna dalam Diskursus Politik pada Media Sosial (kajian Pragmatik)

a. Tindak Tutur Asertif

TTA 1: Pemilu 2019 telah kita lalui dengan bagaimana dinamikanya.

Makna dari TTA 1 dalam tindak tutur asertif sebagai penyataan yang menyampaikan informasi atau fakta mengenai pengalaman berbagai dinamika yang terjadi selama proses tersebut. Tuturan ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau laporan tentang keadaan yang sudah dialami, sehingga penutur mengikat diri pada

kebenaran proposisi bahwa Pemilu 209 sudah dilalui dan mengandung berbagai dinamika yang kompleks.

TTA 2: Demokrasi telah memberikan hak berbicara dan berserikat kepada mereka yang menentang hak-hak paradox demokrasi seperti kaum islam garis keras, taipan dan elit politik, serta mantan jenderal.

Makna dari data TTA 2 paradox demokrasi dimaknai sebagai ketegangan antara idealisme partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan dengan realitas praktik yang justru sering kali didominasi oleh elit atau kepentingan pramtik kelompok tertentu. Dalam praktisnya, kebebasan berdemokrasi juga bisa menimbulkan konsekuensi pragmatik yang tidak selalu positif, seperti pemilihan pemimpin tanpa pertimbangan.

TTA 3: Di tahun 2023 ini tahapan pemilu 2024 sudah dimulai dengan UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu 2019 tidak dilakukan revisi dan masih berlaku.

Maknanya dari data TTA 3 tahapan pemilu tidak hanya dipahami sebagai urutan procedural administratif,melainkan sebagai rangkaian tindakan komunikatif dan sosial yang membentuk makna, legitimasi, serta kepercayaan public terhadap proses demokrasi. Melalui proses ini, makna pemilu tidak sekadar formalitas, tetapi menjadi sarana aktualisasi partisipasi, negosiasi kepentingan, dan penguatan legitimasi sistem politik secara pramatik.

TTA 4: Pemilu 2019 telah kita lalui dengan berbagai dinamikanya.

Makna dari data TTA 4 dinamika merujuk pada proses perubahan dan adaptasi makna tuturan berdasarkan konteks situasi, gubungan antarpenutur, serta tujuan komunikasi yang terus berkembang selama interaksi berlangsung. Dalam pragmatik, dinamika ini menunjukkan bahwa makna tidak bersifat statis, melainkan dapat berubah tergantung pada waktu, tempat, dan siapa yang terlibat dalam komunikasi.

TTA 5: Demokrasi ibarat berdagang.

Makna dari data TTA 5 demokrasi ibarat berdagang merujuk pada cara penggunaan ungkapan metaforis dalam konteks komunikasi untuk menyampaikan pandangan atau kritik terhadap praktik demokrasi dengan pendekatan yang lebih luas. Dalam kajian pragmatik, ungkapan ini mengandung implikatur atau makna tersirat yang hanya dapat dipahami jika pendengar memperhatikan konteks sosial , politik, dan budaya.

TTA 6: Pemilu yang tangguh dan dapat dipercaya.

Makna dari data TTA 6 pemilu yang tangguh dan dapat dipercaya merujuk pada makna kontekstual dan implikatur dari ungkapan tersebut dalam wacana politik atau komunikasi publik. Dalam pragmatik, fokusnya bukan hanya pada arti literal kata-kata, tetapi bagaimana ungkapan itu digunakan untuk membentuk persepsi, menyampaikan maksud tertentu, atau memengaruhi sikap pendengar.

TTA 7: Dialog Demokrasi: Evaluasi dan Arah Kebijakan Pilkada Serentak.

Makna dari data TTA 7 dialog demokrasi memiliki makna yang melampaui arti leksikal sebagai percakapan dalam sistem demokrasi. Dalam konteks ini, makna dialog demokrasi terbentuk dari niat komunikatif pembicara untuk membangun kesepahaman bersama, bukan untuk menang sendiri atau mendominasi.

TTA 8: The Habibie Center didukung oleh Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia dan Kementrian dalam Negeri Republik Indonesia.

Makna dari data TTA 8 dukung oleh KAS Indonesia mengandung makna kontektual dan implikatur tertentu yang bergantung pada situasi komunikasi. Secara pragmatik, tuturan ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk membangun legistimasi, meningkatkan kepercayaan public, atau memberi bobot otoritas terhadap suatu agenda.

TTA 9: Kami mengundang para profesional di bidang politik, pemerintahan, media, dan akademisi untuk bergabung atau berpartisipasi dalam diskusi ini guna untuk bertukar wawasan dan prespektif.

Makna dari data TTA 9 berpartisipasi merujuk pada keterlibatan aktif individu dalam proses komunikasi, baik sebagai penutur maupun pendengar. Partisipasi ini mencakup peran sosial, intensi komunikatif, serta pemahaman terhadap konteks situasi saat berinteraksi.

TTA 10: Peta Politik.

Makna dari data TTA 10 peta politik merujuk pada representasi grafis dari wilayah geografis yang menunjukkan batas-batas administrative, seperti negara, provinsi, atau kabupaten, beserta informasi politik terkait. Dalam konteks pragmatik, makna peta politik melampaui representasi geografis semata. Maknanya tergantung pada konteks penggunaan dan niat komunikatif pembuat peta.

TTA 11: Peta perpolitikan nasional.

Makna dari TTA 11 peta perpolitikan nasional bukan sekadar representasi gografis, melainkan juga tindakan komunikatif yang membawa makna kontekstual. Maknanya ditentukan oleh tujuan pembuat peta (misalnya, informasi, propaganda), pilihan simbol dan warna yang sarat konotasi serta konteks sosial-politik saat peta dibuat dan dinterpretasikan.

b. Tindak Tutur Ekspresif

TTE 12: Cacat demokrasi.

Makna dari data TTE 12 cacat demokrasi bergantung pada konteks penggunaannya. Ia bisa menjadi kritik terhadap praktik demokrasi yang menyimpang dari idealnya (misalnya, korupsi, ketidakadilan), atau justifikasi atas tindakan politik tertentu. Penggunaan istilah ini juga dapat dipengaruhi oleh ideology dan kepentingan pembicara, sehingga pemaknaannya bersifat relative dan bergantung pada siapa yang menggunakannya dan dalam konteks apa.

TTE 13: Pemilu berwarna.

Makna dari data TTE 13 pemilu berwarna merujuk pada bagaimana istilah tersebut digunakan secara implisit untuk menunjukkan bahwa proses pemilu tidak netral, tetapidipengaruhi oleh berbagai kepentingan, afiliasi politik, atau bahkan manipulasi tertentu. Dalam kajian pragmatik, makna ini tidak hanya dilihat secara literal, tetapi dianalisis berdasarkan konteks, maksud pembicara, serta interpretasi pendengar.

TTE 14: Beban psikologis yang tinggi.

Makna dari data TTE 14 beban psikologis yang tinggi merujuk pada kondisi mental atau emosional seseorang yang ditandai dengan tekanan batin yang kuat akibat situasi komunikasi tertentu. Secara pragmatis beban psikologis yang tinggi mengandung makna implisit bahwa individu merasa terbebani secara emosional untuk menyesuaikan atau tindakan komunikatif demi menjaga citra diri, memenuhi ekspresi lawan bicara, atau menghindari konflik.

TTE 15: Pesta Demokrasi Lokal: Evaluasi dan Arah Kebijakan Pilkada Serentak.

Makna dari data TTE 15 pesta demokrasi lokal tidak hanya dipahami secara literal sebagai ajang pemilihan umum di tingkat daerah, tetapi juga sebagai ungkapan yang sarat makna implisit dan fungsi retoris. Dalam kajian pragmatik merupakan ungkapan yang mengandung makna implisit dan ideologis yang lebih dari sekedar arti leksikal. Secara pragmatis, menyampaikan bahwa proses demokrasi yang seharusnya meriah dan inklusif justru didominasi oleh kepentingan segelintir orang.

TTE 16: Jangan lewatkan kesempatan ini.

Makna dari data TTE 16 jangan lewatkan kesempatan ini memiliki makna implisist yang tidak hanya bersifat informative, tetapi juga persuasive dan direktif. Secara leksikal, kalimat ini bermakna ajakan agar seseorang tidak melewatkan suatu peluang. Namun secara pragmatis, ungkapan ini biasanya digunakan untuk mempengaruhi perilaku pendengar agar secara bertibdak, seperti membeli sesuatu, menghadiri acara, atau mengambil keputusan tertentu.

TTE 17: Peta politik nasional.

Makna dari data TTE 17 peta politik nasional tidak hanya dimaknai secara literal sebagai gambaran kekuatan atau distribusi partai politik di tingkat nasional, tetapi juga mengandung makna implisit yang bergantung pada konteks, maksud penutur, dan situasi komunikasi. Secara pragmatis peta politik nasional sering digunakan untuk menyiratkan dinamika kekuasaan, aliansi, konflik kegiatan, dan pergeseran pengaruh antar aktor politik.

c. Tindak Tutur Direktif

TTD 18: Melakukan revisi pemilu.

Makna dari data TTD 18 melakukan revisi pemilu memiliki makna yang tidak hanya bersifat literal, tetapi juga sarat dengan makna implisit, niat komunikatif, dan konteks kekuasaan. Secara leksikal, frasa ini berarti melakukan perubhan terhadap aturan, jadwal atau mekanisme pemilu. Namun, secara pragmatis, ungkapan ini sering menyiratkan tindak tutur yang bersifat politis misalnya penyesuaian demi kepentingan tertentu, pencitraan netralitas, atau bahkan bentuk intervensi terhadap proses demokrasi.

TTD 19: Mengadakan Dialog Demokrasi.

Makna dari data TTD 19 mengadakan dialog demokrasi memiliki makna yang tidak literal, tetapi juga kontekstual dan strategis. Secara leksikal, frasa ini beraryi menyelenggarakan suatu pertemuan atau diskusi terbuka yang melibatkan berbagai pihak untuk membahas isu-isu demokratis, seperti pemilu, partisipasi warga, atau kebijakan publik. Namun secara pragmatik, ungkapan ini mengandung tindak tutur ilokusi berupa ajakan, legitimasi, atau pencitraan.

TTD 20: Daftar sekarang juga melalui tautan atau klik tautan di bio.

Makna dari data TTD 20 daftar sekarang juga melalui tautan atau klik tautan di bio untuk mendorong atau mengarahkan tindakan dari pendengar atau pembaca. Secara leksikal, kalimat ini berisi perintah atau ajakan agar seseorang segera mendaftar melalui tautan tertentu. Namun secara pragmatis, maknanya jauh lebih dalam karena mengandung strategi persuasive dan urgensi tersembunyi.

TTD 21: Catat tanggalnya.

Makna dari data TTD 21 catat tanggalnya memiliki makna yang lebih dari sekadar intruksi untuk mencatat sebuah tanggal. Secara leksikal, kalimat ini mengarah pada ajakan atau perintah agar seseorang menuliskan atau mengingat tanggal tertentu, seperti tanggal acara penting, peluncuran produk, atau peristiwa lainnya. Namun secara pragmatis kalimat ini bermakna sebagai tindak tutur direktif yang bertujuan untuk mengarahkan atau memotivasi pendengar atau pembaca agar memperhatikan dan tidak melupakan tanggal tersebut.

d. Tindak Tutur Komisif

TTK 22: Memperketat persyaratan kesehatan untuk petugas pemilu.

Makna dari data TTK 22 memperketat persyaratan kesehatan memiliki makna yang tidak hanya bersifat informative, tetapi juga strategis dan persuasif. Secara leksikal, frasa ini berarti membuat aturan atau kebijakan kesehatan menjadi lebih ketat atau lebih sulit dipenuhi, misalnya dengan meningkatkan standar atau menambah kriteria tertentu dalam prosedur kesehatan. Namun secara pragmatis, ungkapan ini mengandung makna implisit yang mencerminkan niat atau tujuan komunikasitif di balik perubahan kebijakan tertentu.

TTK 23: Kami mengundang para profesional di bidang politik, pemerintahan, media, dan akademisi untuk bergabung dalam diskusi ini guna bertukar wawasan dan prespektif.

Makna dari data TTK 23 profesional memiliki makna yang bergantung pada konteks maksud penutur, dan interpretasi pendengar. Secara leksikal, profesional berarti seseorang menjalankan pekerjaannya dengan standar tinggi, keahlian, dan etika tertentu. Namun secara pragmatik, kata ini dapat mengandung makna implisit, digunakan untuk menilai, memuji, menyindir, atau mempengaruhi sikap seseorang terhadap tindakan atau perilaku tertentu.

e. Tindak Tutur Deklarasi

TTD 24: Pemilu 2019 telah kita lalui dengan berbagai dinamikanya.

Makna dari data TTD 24 dinamika merujuk pada perubahan, perkembangan, atau pergerakan dalam interaksi komunikasi yang bersifat kontekstual dan tidak statis. Secara leksikal, dinamika berarti sesuatu yang terus bergerak atau berubah. Namun secara pragmatik, makna ini lebih dalam, karena merujuk pada bagaimana makna, maksud, dan hubungan antarpenutur berkembang seiring situasi dan ujaran yang terjadi dalam percakapan atau wacana.

TTD 25: Pemilihan yang tangguh dan dapat dipercaya.

Makna dari data TTD 25 pemilihan yang tangguh dan dapat dipercaya merujuk pada strategi komunikasi yang menunjukkan keteguhan sikap penutur sekaligus membangun kepervayaan dalam interaksi. Ketangguhan dalam berarti penutur mampu

menyampaikan maksudnya dengan tegas, konsisten, dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan situasi atau lawan bicara.

TTD 26: Menelaah Peta Politik Nasional.

Makna dari data TTD 26 menelaah peta politik nasional berarti menganalisis cara-cara penggunaan bahasa dalam ranah politik yang mencerminkan dinamika kekuasaan, kepentingan, dan ideologi di tingkat nasional. Dalam konteks pragmatik, penelaah ini fokus pada bagaimana aktor-aktor politik menggunakan bahasa untuk membangun citra, mempengaruhi opini publik, menyembunyikan atau menonjolkan mekasud tertentu, serta membentuk relasi kuasa dalam wacana publis.

Pembahasan

Menurut Kovecses (2002: 50), metafora berperan penting sebagai penghubung antara pemikiran dan komunikasi. Dengan memanfaatkan metafora, pembicara dapat menyampaikan ide, emosi, dan konsep yang sulit diungkapkan secara langsung. Selain memperkaya bahasa, metafora juga membantu mengungkapkan pemikiran dan perasaan yang mendalam, yang mungkin sulit dinyatakan dengan kata-kata literal. Sebagai contoh, ungkapan "jantung yang hancur" tidak hanya menggambarkan kerusakan fisik, tetapi juga mencerminkan kehilangan yang mendalam.

Metafora memiliki peranan penting dalam bahasa dan hubungannya dengan masyarakat. Metafora berfungsi sebagai alat untuk menciptakan pengertian baru, menjelaskan, menggambarkan, serta mengungkapkan dan menilai suatu ide. Selain itu, metafora juga dapat menghibur, memperkaya bahasa, menjadi sumber polisemi dan sinonimi, mendorong penafsiran, serta membangun makna baru. Pada awalnya, metafora lebih banyak digunakan dalam ungkapan figuratif yang terdapat dalam karya sastra. Namun, seiring berjalannya waktu, penggunaannya telah meluas menjadi hal yang biasa dalam bahasa sehari-hari. Terutama sejak Lakoff dan Johnson (2003: 5) menerbitkan buku yang menjelaskan bahwa metafora merupakan bentuk perbandingan antara dua hal yang disampaikan secara langsung dan singkat.

Metafora dalam video Youtube tersebut digunakan untuk menggambarkan fenomena politik dengan cara yang lebih hidup dan mudah dipahami. Metafora seperti “demokrasi ibarat berdagang” dan “paradox toleransi” memberikan gambaran yang kuat tentang masalah-masalah yang dihadapi demokrasi Indonesia.

Tindak tutur dalam video Youtube tersebut digunakan untuk menyampaikan fakta dan argument terkait kondisi demokrasi di Indonesia (Asertif). Tindak tutur ekspresif digunakan untuk mengungkapkanharapan dan keinginan terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Tindak tutur direktif digunakan untuk mengarahkan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan kualitas demokrasi. Tindak tutur komisif digunakan untuk menyatakan komitmen dan rencana tindakan yang akan dilakukan.

Dalam kajian pragmatik, hakikat makna tidak hanya diambil dari struktur bahasa, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan tujuan komunikatif.

Dalam pragmatik, makna dapat dibagi menjadi dua kategori utama: makna linguistik dan makna pragmatik. Makna linguistik merujuk pada makna yang melekat pada kata-kata atau frasa berdasarkan struktur bahasa itu sendiri. Sebaliknya, makna pragmatik dipengaruhi oleh konteks dan berhubungan dengan cara tuturan tersebut ditafsirkan dalam situasi tertentu. Dalam kajian pragmatik, makna berkaitan dengan pemahaman penggunaan bahasa dalam konteks tertentu. Pragmatik tidak hanya mempertimbangkan makna secara harfiah, tetapi juga makna yang muncul dari situasi

komunikasi, hubungan antara penutur dan pendengar, serta konteks sosial dan budaya (Leech, 1983: 6-10).

Tindak tutur berfungsi sebagai penentu makna dalam kalimat. Setiap interaksi yang melibatkan komunikasi merupakan bentuk tindak tutur, di mana manusia menggunakan komunikasi untuk menyampaikan gagasan, maksud, dan perasaan mereka. Tindak tutur merupakan tindakan yang dilakukan melalui bahasa. Dalam penelitian ini, analisis tindak tutur difokuskan pada lima kategori: asertif, ekspresif, direktif, komisif, dan deklarasi.

Tindak tutur asertif merupakan pernyataan yang bertujuan menyampaikan informasi atau menyatakan fakta. Dalam video, beberapa pernyataan asertif digunakan untuk menjelaskan kondisi demokrasi di Indonesia, menilai pelaksanaan Pemilu 2019, dan mengungkap kelemahan sistem pemilu yang ada. Menurut Taringan (dalam Nur Khadijah R., 2023: 58), asertif adalah bentuk tuturan yang melibatkan pembicara pada kebenaraan proposisi yang diekspresikan.

Tindak tutur ekspresif merupakan pernyataan yang bertujuan mengungkapkan perasaan atau sikap pembicara. Dalam video, tindak tutur ekspresif digunakan untuk mengungkapkan keprihatian terhadap kualitas demokrasi di Indonesia dan menunjukkan simpati terhadap korban kelelahan dalam pelaksanaan pemilu. Menurut Taringan (dalam Nur Khadijah R., 2023: 61), tindak tutur ekspresif mempunyai fungsi untuk mengekspresikan, mengungkapkan atau memberitahukan sikap psikologis sang pembicara menuju suatu pernyataan keadaan yang bersikap oleh ilokusi.

Tindak tutur direktif merupakan pernyataan yang bertujuan mempengaruhi perilaku pendangar. Dalam video, tindak tutur direktif digunakan untuk mengajak pendengar memperhatikan isu-isu penting dalam demokrasi dan menekankan pentingnya melakukan perubahan untuk memperbaiki sistem pemilu. Menurut Taringan (dalam Nur Khadijah R., 2023: 59), tindak tutur direktif dimaksudkan untuk menimbulkan beberapa efek melalui tindakan sang penyimak.

Tindak tutur komisif merupakan pernyataan yang mengungkap komitmen pembicara untuk melakukan sesuatu di masa depan. Dalam video, tindak tutur komisif digunakan untuk menunjukkan komitmen The Habibie Center untuk menyelenggarakan dialog demokrasi yang bertujuan untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Menurut Taringan (dalam Nur Khadijah R., 2023: 62), tindak tutur komisif melibatkan pembicara atau penutur pada beberapa tindakan yang akan datang.

Tindak tutur deklarasi merupakan pernyataan perubahan status atau kondisi. Menurut Taringan (dalam Nur Khadijah R., 2023: 63), tindak tutur deklarasi adalah tindak tutur ilokusi yang apabila performasinya akan menyebabkan korespondesi yang baik antara isi proposional dengan realitas. Dalam video, tindak tutur deklarasi digunakan untuk menyatakan tema dialog yang diselenggarakan oleh *The Habibie Center.*

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan. Analisis data data menunjukkan bahwa penggunaan metafora dan makna tindak tutur dalam diskursus politik pada video Youtube "Demokrasi Indonesia Menuju Pemilu 2024: Wacana dan Praktis" menunjukkan beberapa hal:

a. Metafora: Penggunaan metafora menunjukkan upaya untuk memperjelas konsep dan menciptakan makna baru dalam diskursus politik.
b. Makna: Penggunaan makna dapat menunjukkan upaya yang diungkapkan dari metafora.

c. Tindak tutur: Tindak tutur asertif, ekspresif, direktif, komisif, dan deklarasi menunjukkan upaya untuk menyampaikan informasi, mengungkap perasaan, mempengaruhi perilaku, menyatakan komitmen, dan menyatakan perubahan status atau kondisi.

Secara keseluruhan, video yang diteliti menggambarkan dinamika diskursus politik di Indonesia sepuitar pemilu. Penggunaan metafora, makna dan tindak tutur menunjukkan upaya para narasumber untuk memperjelas pandangan, mengungkap keprihatinan, dan mengajak pendengar untuk memperhatikan isu demkorasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Anoval, KD, & Rasyad, MIH (2022). Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Sosial. Konsep: Jurnal Sosial Humaniro dan Pendidikan, 4-5.

Fairclough, N. (2021). Critical Discourse Analysis and Politics. New York: Routledge.

Hidayat, T. (2021). Media Sosial dan Citra Politik: Perspektif Semiotik. Jurnal Komunikasi, 10(3), 200-210.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). Metafora yang Kita Jalani. Chicago: Pers University of Chicago Press.

Leech, G. (1983). Prinsip-prinsip Pragmatik. London: Longman.

Ma'ruf, MA (2022). Fungsi Metafora Politik dalam Media Massa. EDU-KATA, 8(1), 45-50.

Miller, M. (2009). YouTube untuk Bisnis: Pemasaran Video Daring untuk Bisnis Apa Pun. Que Publishing.

Nur Khadijah R. (2023). Pragmatik Berbasis Blended Learning. PT. Insan Cendikia Mandiri Group, 35-63.

Prabhakaran, V., Rei, M., & Shutova, E. (2021). Bagaimana Metafora Mempengaruhi Wacana Politik: Studi Skala Besar yang Tidak Membedakan Topik Menggunakan Deteksi Metafora Neural. arXiv preprint arXiv: 2104.03928

Ratnawati, R., Tolla, A., & Rahim, A. R. (2018). Communicative Approach Over Text-Based Indonesian Language Textbooks. In 1 st Internasional Conference on Social Sciences (ICSS 2018) (PP. 1117-1122). Atlantis Press.

Searle, JR (1979). Ekspresi dan Makna: Studi dalam Teori Tindak Tutur. Cambridge: Cambrid, 45-50.

Yulianti, T. (2022). Meme sebagai Strategi Komunikasi Politik. Jurnal Budaya Digital, 8(3), 123-140.